



Mekanisme Non-Peradilan dalam usaha alaskaki di dunia global dan rantai penyediaan pakaian

Pelajaran dari buruh Indonesia

Ringkasan eksekutif - Bahasa Indonesia

Dr Tim Connor
UNIVERSITY OF NEWCASTLE

Dr Annie Delaney
RMIT UNIVERSITY

Sarah Rennie
MELBOURNE UNIVERSITY

Tentang Rangkaian Laporan

Dokumen ini adalah bagian dari rangkaian laporan yang disiapkan oleh Non-Judicial Human Rights Mechanism Project (Proyek Mekanisme Penyelesaian Masalah HAM secara Non-Peradilan, NJHRMP), yang menggambarkan temuan berdasarkan lima tahun penelitian. Hasil temuan tersebut didasarkan pada lebih dari 587 wawancara, dengan 1.100 orang, dari berbagai wilayah di beberapa negara serta beberapa studi kasus. Mekanisme penyelesaian non-peradilan mendapat mandat untuk menerima pengaduan dan memediasi keluhan, tetapi tidak berwenang untuk menghasilkan putusan hukum yang mengikat. Fokus dari proyek ini adalah untuk menganalisa efektivitas dari mekanisme tersebut didalam merespon tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terkait dengan kegiatan bisnis transnasional.

Rangkaian laporan ini mendapatkan pelajaran dan memberikan rekomendasi sebagai berikut:




- Mekanisme non-peradilan dapat menghadirkan penyelesaian masalah dan keadilan bagi masyarakat dan buruh yang rentan.
- LSM dan perwakilan buruh dapat lebih memanfaatkan secara efektif keberadaan mekanisme tersebut untuk mendukung dan mewakili masyarakat dan buruh yang rentan.
- Mekanisme penyelesaian masalah tersebut berkontribusi bagi hadirnya respek jangka panjang dan berkelanjutan serta penyelesaian masalah HAM oleh para pebisnis selama kegiatan usaha mereka, rantai suplai, dan hubungan bisnis lainnya.

NJHRMP adalah kolaborasi penelitian akademik antara University of Melbourne, Monash University, University of Newcastle, RMIT University, Deakin University, dan University of Essex. Proyek ini didanai oleh Australian Research Council (Dewan Riset Australia) dengan dukungan beberapa LSM, termasuk CORE Coalition UK, HomeWorkers Worldwide, Oxfam Australia, dan ActionAid Australia. Tim Peneliti Utama adalah Dr Samantha Balaton-Chrimes, Dr Tim Connor, Dr Annie Delaney, Prof Fiona Haines, Dr Kate Macdonald, Dr Shelley Marshall, May Miller-Dawkins, dan Sarah Rennie. Koordinator proyek ini adalah Dr Kate Macdonald and Dr Shelley Marshall. Laporan penelitian menggambarkan pendapat akademik yang independen atas berbagai perdebatan yang ada. Pandangan yang disampaikan adalah pendapat masing-masing penulis dan belum tentu merupakan pendapat dari lembaga-lembaga yang memberikan dukungan atas penelitian ini.

 <http://corporateaccountabilityresearch.net/njm-report-xiv-indo-footwear>



© 2016 Tim Connor, Annie Delaney and Sarah Rennie. Non-judicial mechanisms in global footwear and apparel supply chains: Lessons from workers in Indonesia is published under an unported Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike (CC-BY-NC-SA) licence, details of which can be found at <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

 info@corporateaccountabilityresearch.net
 https://twitter.com/caresearch_au
 corporateaccountabilityresearch.net

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buruh pabrik di Indonesia yang memproduksi alas kaki dan pakaian untuk beberapa merek terkenal di dunia seringkali ditolak hak-hak dasarnya, termasuk kebebasan berorganisasi supaya mempunyai kekuatan daya tawar kolektif, dan memperjuangkan upah kerja yang layak. Berjuang di tengah-tengah penegakan hukum yang lemah, para buruh berhadapan langsung dengan berbagai hambatan dalam mencari keadilan untuk pelanggaran hak-hak dasar mereka. Dalam lingkungan kerja yang terkadang sangat tidak ramah dengan aktivis perburuhan, perwakilan buruh yang aktif bergerak dan menuntut perbaikan kondisi kerja sering dihadapkan dengan intimidasi, diskriminasi dan ancaman terhadap keamanan ekonomi mereka.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, serikat buruh Indonesia semakin sering menggunakan mekanisme non-peradilan, termasuk berbagai mekanisme penyelesaian internasional berbasis HAM, guna memperkuat peluang mereka mendapatkan pemulihan atas pelanggaran hak-hak dasarnya sebagai pekerja. Laporan ini mengkaji penggunaan mekanisme tersebut oleh serikat buruh Indonesia yang mewakili pekerja dalam rantai pasokan global alas kaki dan pakaian bermerek, dengan fokus utama pada upaya mereka untuk menerapkan kebebasan berorganisasi supaya mempunyai kekuatan daya tawar kolektif, dan memperjuangkan upah kerja yang layak. Untuk menggambarkan tantangan besar yang ada, laporan ini terhubung pada data online yang menyediakan cerita kronologis yang rinci tentang perjuangan selama 17 tahun oleh sebuah serikat buruh guna mencari pemulihan atas berbagai pelanggaran perburuhan yang dilakukan satu produsen alas kaki tertentu (Pabrik C). Analisis laporan ini juga disusun berdasarkan pada berbagai studi kasus umum yang terjadi di dalam sektor usaha yang sama.

Pelajaran Utama

Penelitian kami menunjukkan bahwa, daripada hanya mengandalkan pada satu mekanisme pemulihan untuk mencari keadilan, serikat buruh Indonesia di industri tersebut umumnya menggunakan beberapa strategi untuk menyelesaikan keluhannya, termasuk memanfaatkan mekanisme non-peradilan, pengaduan hukum secara formal, dan strategi kampanye yang informal. Harapan mereka atas setiap mekanisme non-yudisial didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Serikat buruh sering menggunakan beberapa mekanisme tersebut untuk mencapai tujuan yang belum tentu telah dimaksudkan oleh orang-orang yang merancang mekanisme penanganan keluhan. Sebagai contoh, keluhan terkadang diajukan pada mekanisme non-peradilan negara seperti Komisi Nasional HAM Indonesia, bukan karena serikat buruh berharap bahwa Komnas akan melakukan penyelidikan (mereka tahu bagaimana-kurangnya sumber daya Komnas), tetapi karena mereka tahu bahwa jika polisi setempat mendengar bahwa Komnas HAM mungkin akan melakukan penyelidikan, maka peluang polisi akan memproses pengaduan mereka menjadi lebih besar. Mengajukan keluhan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai maksud yang sama, ditambah lagi LPSK juga menyediakan perlindungan bagi pelapor yang takut bahwa pengaduannya dapat menempatkan mereka dalam kondisi berbahaya. Komunikasi telepon yang reguler dengan LPSK (dan telepon dari LPSK kepada polisi untuk mengecek kemajuan penyelidikan mereka) menguatkan para pekerja

dan memberi mereka kepercayaan untuk terus mendapatkan pemulihan melalui mekanisme tersebut, meskipun kapasitas LPSK sangat terbatas untuk dapat langsung membantu mereka menyelesaikan keluhannya.

Dalam setiap kasus yang kami teliti, strategi yang kompleks dengan beberapa mekanisme keluhan diperkuat dengan berbagai upaya agar mendapatkan liputan oleh media lokal dan/atau internasional atas keluhan yang diajukan. Upaya tersebut menggunakan berbagai metode, termasuk demonstrasi, koneksi dengan jaringan nasional dan global aktivis, serta media sosial seperti YouTube dan Facebook. Pengalaman serikat buruh adalah jika mereka berhasil mendapatkan cukup perhatian atas perselisihannya melalui keterlibatan dengan media tradisional dan/atau media sosial, maka tidak hanya meningkatkan tekanan pada perusahaan-perusahaan lokal dan internasional untuk memperhatikan keluhan mereka secara lebih serius tetapi, dalam konteks masih lemahnya komitmen negara atas aturan hukum, itu juga dapat mempengaruhi cara lembaga negara (seperti polisi dan pengadilan) menanggapi keluhan mereka.

Untuk memahami bagaimana mekanisme non-peradilan berkontribusi pada keputusan keluhan berbasis hak, menjadi penting untuk melihat tidak hanya peran mereka sebagai proses yang berbeda, dan mempertimbangkan bagaimana mereka berinteraksi dengan strategi perjuangan lainnya. Penelitian kami menunjukkan bahwa, mekanisme non-peradilan dapat memainkan peran yang lebih berguna jika dilakukan dalam ruang tertutup. Tentu saja proses yang tidak terbuka itu perlu dipertimbangkan ketika mekanisme non-peradilan dirancang atau direformasi, sehingga setiap mekanisme dapat memainkan perannya secara lebih baik sebagai alat penyelesaian masalah.

Perwakilan buruh melaporkan bahwa mekanisme non-peradilan dapat lebih berguna karena kemampuannya untuk melibatkan pemangku kepentingan yang berada di luar jangkauan yurisdiksi dari badan-badan penegak hukum yang biasa. Di sektor bisnis yang sangat global, upaya untuk melakukan perbaikan kondisi kerja harus mempengaruhi kekuatan lokal dan global yang mempunyai pengaruh atas kondisi tersebut. Karena alasan demikian, serikat buruh Indonesia di sektor bisnis pakaian dan alaskaki menggunakan mekanisme non-yudisial untuk menargetkan tidak hanya produsen lokal tapi juga pembuat keputusan perusahaan di tingkat internasional, terutama para pembeli dunia. Hal demikian menunjukkan arti pentingnya mekanisme non-peradilan sebagai bagian dari strategi advokasi terkoordinasi yang menargetkan para pemangku kepentingan lokal maupun internasional. Hal itu juga menunjukkan pentingnya hubungan antara organisasi-organisasi buruh lokal dengan organisasi masyarakat sipil internasional, yang sering menghubungkan akses ke mekanisme pemulihan non-peradilan internasional dan dialog dengan para pembeli internasional.

Laporan ini menemukan bahwa, sementara banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas mekanisme keluhan non-peradilan, ada tiga hal yang menonjol dalam konteks meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Pertama, daya jangkau menjadi sangat penting, untuk suatu mekanisme memfasilitasi keterlibatan serikat buruh dan mendukung kebebasan berserikat—tanpa dukungan dari organisasi-organisasi perwakilan mereka sendiri, tentu perjuangan sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin, untuk setiap pekerja mencapai perubahan yang lebih baik. Kedua, jika mekanisme non-peradilan dapat berkontribusi menjadi penilaian



Cover: A sports shoe factory.

Source: Clean Clothes Campaign

yang otoritatif atau membantu verifikasi fakta-fakta di sekitar dugaan pelanggaran, hal demikian akan lebih memotivasi para pihak untuk tidak hanya menyelesaikan sengketa faktual tetapi membangun dialog yang lebih konstruktif di antara mereka. Ketiga, kapasitas mekanisme penanganan keluhan tertentu untuk mendesak pengaruh pada praktek-praktek pembeli global adalah faktor penting yang mempengaruhi dampak dari mekanisme penyelesaian masalah. Dalam konteks persaingan pesanan produk yang ketat, produsen tidak akan termotivasi untuk meningkatkan upah dan kondisi kerja jika mereka diwajibkan untuk sepenuhnya menutupi setiap peningkatan biaya produksi yang dikeluarkan. Sejauh mana setiap mekanisme dapat memaksa pembeli di luar negeri untuk berbagi peningkatan biaya adalah faktor kunci dalam upaya perbaikan yang berkelanjutan atas HAM para pekerja.

Secara keseluruhan, laporan studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada mekanisme yang efektif dalam memberikan perbaikan komprehensif bagi pekerja di bisnis pakaian dan alas kaki di Indonesia, dengan secara serentak mengajukan berbagai keluhan, serikat buruh pada bisnis ini telah mendorong bentuk akuntabilitas lintas lembaga, dan peningkatan tekanan pada para pengambil keputusan kunci yang terlibat dalam mekanisme untuk memperhatikan keluhan mereka secara lebih serius. Dalam beberapa kasus, strategi penyampaian keluhan melalui beberapa strategi itu telah memperkuat penghormatan atas hak-hak pekerja dan meningkatkan ruang gerak bagi pekerja untuk berorganisasi dan memperjuangkan hak-hak mereka yang lain.

Namun, sementara kami menemukan bukti bahwa menggabungkan beberapa strategi tersebut dapat meningkatkan penghormatan atas hak-hak pekerja, pencapaian dalam kasus-kasus dimana

ada perbaikan HAM umumnya parsial dan sementara. Terlebih lagi, sejumlah serikat buruh Indonesia, yang sebelumnya telah bekerja secara efektif dengan jaringan serikat buruh internasional dan organisasi hak buruh untuk meningkatkan tekanan pada pemilik merek global dan para pemasok mereka, sekarang menyadari bahwa jaringan kerjasama tersebut telah melemah. Pelemahan itu karena organisasi-organisasi yang berkampanye pada isu-isu ini di negara-negara maju menemukan kesulitan untuk mendanai kampanye mereka. Juga karena pemerintah Indonesia membuat lebih sulit bagi organisasi-organisasi internasional yang bekerja pada isu-isu tersebut untuk tetap hadir di Indonesia.

Dengan demikian, sementara secara strategis, upaya menyelesaikan keluhan melalui berbagai mekanisme yang beroperasi pada skala yang berbeda dapat meningkatkan kesempatan bagi buruh garmen Indonesia untuk mendapatkan penyelesaian yang berarti, upaya penyelesaian yang demikian tidak boleh terlalu diharapkan. Dalam ketiadaan perlindungan negara yang mengikat dan dilaksanakan dengan benar, perjuangan sektor perburuhan dan HAM akan tetap sangat sulit bagi pekerja pakaian dan alaskaki untuk membujuk majikan mereka menghormati hak-hak buruhnya.

corporateaccountabilityresearch.net



Corporate
Accountability
Research

©2016



GRAPHIC DESIGN BY
OPF-TECH.NET